



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 30 /SEK/KU.00/01/2021 7 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung
Semester II TA 2020

- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
 5. Sekretaris Badan Pelatihan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
 6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 7. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia
 8. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 bahwa seluruh satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester/Tahunan dari Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA, serta dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2020, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat ini dan berpedoman pada:

1. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L LKKL Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun 2020,
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya (dapat diunduh pada aplikasi Komdanas).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harap Saudara mengikuti langkah-langkah yang dibutuhkan ini agar Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun 2020 dapat disampaikan secara tepat waktu, andal dan berkualitas.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan pada Mahkamah Agung RI
5. Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung RI
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Lampiran I
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 30 /SEK/KU.00/01/2021
Hal : Pedoman, Perlakuan Akuntansi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Mahkamah Agung RI
Semester II TA 2020

**PEDOMAN, PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
MAHKAMAH AGUNG RI SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Tingkat UAKPA (Satker) membandingkan Saldo Awal Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Neraca Percobaan, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per tanggal 31 Desember 2019 *Audited* secara manual pada aplikasi SAIBA dan aplikasi e-Rekon&LK G2 dengan *login* Tahun 2019 dan/atau membandingkan dengan Laporan serupa per tanggal 31 Desember 2020 pada sisi perbandingan tahun lalu yang dihasilkan pada aplikasi SAIBA dan aplikasi e-Rekon&LK G2;
2. Tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA membandingkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Neraca Percobaan, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per tanggal 31 Desember 2019 *Audited* secara manual dengan Laporan serupa per tanggal 31 Desember 2020 pada sisi perbandingan tahun lalu yang dihasilkan pada aplikasi e-Rekon&LK G2;
3. Memastikan akun-akun akrual tahun 2019 telah dilakukan jurnal balik pada awal tahun 2020 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 antara lain: Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas/Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*), Piutang PNBPN, Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga), Pendapatan Diterima di Muka dan Utang Jangka Pendek Lainnya serta reklasifikasi Bagian Lancar Piutang TP/TGR ke Piutang Tagihan TP/TGR;
4. Bagi satuan kerja yang tidak menyajikan saldo akrual Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) pada tahun 2019 atau terdapat selisih nilai realisasi belanja tahun 2020 dengan saldo akrual Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) tahun 2019 yang telah disajikan, agar melakukan Koreksi Beban pada Laporan Operasional tahun 2020 (lampiran XII);
5. Lakukan Rekonsiliasi Internal Data Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA terlebih dahulu dengan akurat dan valid sebelum mengunggah ADK ke aplikasi e-Rekon&LK G2 Kementerian Keuangan RI dan memastikan telah meng-*update* aplikasi Persediaan, SIMAKBMN, dan SAIBA versi terbaru/terakhir serta Satker telah melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. Pada aplikasi Persediaan, lakukan batal terima dan pengiriman ulang ke aplikasi SIMAKBMN mulai bulan Januari sampai dengan Desember,
 - b. Pada aplikasi SIMAKBMN, lakukan batal terima dari aplikasi Persediaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember namun hanya terima ulang untuk bulan Desember, dan
 - c. Pada aplikasi SAIBA, lakukan Pengosongan Transaksi → Pengosongan GL Aset. kemudian lakukan Pack Data dan hanya terima ulang serta Posting untuk bulan Desember;
6. Satuan Kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester II/ Tahunan Tahun 2020 dan cetakan Laporan Keuangan (LRA, Neraca, Neraca Percobaan, LO dan LPE) dan cetakan Laporan Barang Milik Negara (BMN) mendownload dari aplikasi e-Rekon&LK G2;
7. Satuan kerja wajib membuat Tabel Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap/Aset Lainnya, Tabel Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Tabel Daftar Hibah Langsung pada Laporan Keuangan Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;

8. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) terdiri dari TDK Pagu Anggaran, TDK Estimasi PNBPN, TDK Belanja *Netto* dan TDK Pendapatan *Netto* pada aplikasi e-Rekon&LK G2;
9. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Rekonsiliasi Internal Sawal dan Berjalan pada aplikasi e-Rekon&LK G2;
10. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada aplikasi e-Rekon&LK G2 kecuali bila ada Transfer Keluar dan Transfer Masuk dari K/L lain atau Satker melakukan likuidasi;
11. Tidak diperbolehkan terdapat Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Semester II/Tahunan pada Neraca per 31 Desember 2020. Apabila terdapat akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister pada akhir tahun dikarenakan ketidaksesuaian akun belanja atau akibat perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka dapat dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada aplikasi SAIBA sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L LKKL Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun 2020 (lampiran II) dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat diunduh pada aplikasi Komdanas;
12. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Tidak Normal pada aplikasi e-Rekon&LK G2. Apabila terdapat saldo Tidak Normal, mohon diperbaiki dan/atau diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CaLK Laporan Keuangan jika tidak bisa diperbaiki;
13. Tidak diperbolehkan terdapat saldo Minus pada realisasi belanja minus (pagu minus) dan saldo Minus pada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja pada aplikasi e-Rekon&LK G2. Apabila terdapat saldo Minus, mohon diperbaiki dan/atau diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CaLK Laporan Keuangan jika tidak bisa diperbaiki;
14. Tidak diperbolehkan terdapat selisih saldo Jurnal Tidak Lazim pada aplikasi e-Rekon&LK G2. Apabila terdapat Jurnal Tidak Lazim, mohon diperbaiki dan/atau diberikan penjelasan dan pengungkapan pada CaLK Laporan Keuangan jika tidak bisa diperbaiki. Sebagai contoh jurnal terkait Hibah diperbolehkan dengan penjelasan di CaLK;
15. Satuan kerja wajib menyajikan saldo akrual terkait tagihan pembayaran yang belum terbayarkan dan setoran SSBP/SSPB yang belum disetorkan ke Negara karena melewati Tahun Anggaran 2020, agar membuat/menyusun Kartu Rincian dan Daftar Perhitungan serta mendokumentasi seluruh dokumen sumber transaksi akrual dan dituangkan dalam Formulir Memo Penyesuaian yang wajib diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku penanggung jawab atas Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum yang dibuat serta diungkapkan pada CaLK. Transaksi akrual dimaksud di antaranya:
 - a. Kas di Bendahara Pengeluaran (lampiran III)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atas sisa UP/TUP,
 - b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (lampiran IV)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, SSBP dan dokumen lainnya atas pengembalian sisa belanja pegawai, belanja barang atau belanja modal yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2020, serta tanda terima penyerahan kas kepada pegawai yang diserahkan di atas tanggal 31 Desember 2020,
 - c. Kas di Bendahara Penerimaan (lampiran V)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, SSBP atas penyetoran ke Kas Negara yang ada di Bendahara Penerimaan yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2020,
 - d. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (lampiran VI)
Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, SSBP dan dokumen lainnya atas penyetoran ke Kas Negara yang belum diterima di Bendahara Penerimaan yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2020

e. Piutang PNBPN dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN (lampiran VII)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, SSBP, Potongan SPM dan dokumen lainnya atas penyeteroran ke Kas Negara yang belum diterima oleh Bendahara Pengeluaran (masih berada dipihak ketiga) yang disetorkan di atas tanggal 31 Desember 2020,

f. Reklasifikasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dan Piutang Tagihan TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TP/TGR (lampiran VIII)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, SSBP, Potongan SPM dan dokumen lainnya atas penyeteroran ke Kas Negara melalui proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR),

g. Pendapatan Diterima di Muka (lampiran IX)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, SSBP, Perjanjian Kontrak dan dokumen lainnya atas penyeteroran ke Kas Negara melalui proses Perjanjian Sewa, SK Sekretaris Mahkamah Agung atas penetapan pelaksanaan sewa Barang Milik Negara

h. Belanja Dibayar di Muka (lampiran X)

Dokumen sumber berupa Kartu Rincian, Memo Penyesuaian, Daftar GPP, Potongan SPM, bukti pembayaran dan dokumen lainnya atas pembayaran kepada pihak ketiga,

i. Belanja Yang Masih Harus Dibayar/Utang Pihak Ketiga (lampiran XI)

Dokumen sumber berupa:

- 1) SK Kenaikan Gaji Pokok, SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Kenaikan Menduduki Jabatan, Kekurangan Belanja Uang Makan dan lain-lain serta perhitungannya berdasarkan GPP Gaji, untuk menjelaskan penyajian saldo Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2020;
- 2) SPM/SP2D, SPP, DRPP, SPBy, dan Kuitansi tagihan speedy, listrik, telepon, air, tagihan sewa atau tagihan lainnya, untuk menjelaskan penyajian saldo Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2020,
- 3) Kuitansi tagihan Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga) pada Neraca Satker per 31 Desember 2020,

Contoh Jurnal Penyesuaian dengan Formulir Memo Penyesuaian adalah sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Kementerian Negara/Lembaga		:	Mahkamah Agung RI		
Eselon I		:	Badan Urusan Administrasi		
Wilayah		:	Instansi Pusat		
Satuan Kerja		:	Badan Urusan Administrasi		
No. Dokumen		:	Kartu Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)		
Tanggal		:	31 Desember 2020		
Tahun Anggaran		:	Tahun 2020		
Keterangan		:	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tuntutan Perbendaharaan/Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020		
Kategori Jurnal Penyesuaian:					
<input checked="checked" type="checkbox"/> V Penyisihan Piutang					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXXX	
	K	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		XXXX
Dibuat		:	Kasubbag Keuangan	Disetujui : Kuasa Pengguna Anggaran	
		:	AAAAA, SE	Diinput : Operator SAIBA	
		:	31 Desember 2020	Tangga : 31 Desember 2020	

16. Menyusun kartu piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih per 31 Desember 2020 dengan perhitungan sebagai berikut:
- Kondisi Lancar : $5/1000 \times \text{Jumlah Piutang TP/TGR}$
 - Kondisi Macet : $100\% \times \text{Jumlah Piutang TP/TGR}$
 - Ilustrasi Jurnal atas penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2020 di bawah ini melalui Jurnal Penyesuaian kategori 05:

Pada aplikasi SAIBA (Penyisihan Piutang Jangka Panjang)

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	xxxx	
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		xxxx

- Setelah membuat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, kemudian lakukan Reklasifikasi Bagian Lancar TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian lancar TP/TGR pada akhir tahun 2020 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10274/PB/2016 tentang Petunjuk Penggunaan Jurnal Piutang Tagihan TP/TGR dalam aplikasi SAIBA;
- Melakukan Inventarisasi Fisik (Opname Fisik) atas persediaan per 31 Desember 2020 dan menginput hasil opname fisik pada aplikasi Persediaan pada Menu → Transaksi → Hasil Opname Fisik;
- Satuan kerja wajib melakukan penyusutan dan amortisasi reguler semester I dan II tahun 2020 pada aplikasi SIMAKBMN Menu → *Utility* → Penyusutan Reguler Semesteran;
- Untuk menjaga keandalan dan kualitas Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2020, Satker agar membuat dan melakukan verifikasi serta validasi dengan menggunakan Kertas Kerja Telaah yang ditandatangani dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dan Kepala Sub Bagian Keuangan pada Tingkat Satker (UAKPA), Kepala Sub Bagian Keuangan Tingkat Koordinator Wilayah (UAPPA-W), Kepala Sub Bagian Akuntansi Unit Eselon I (UAPPA-E1) dan Kepala Bagian Akuntansi Lembaga (UAPA);
- Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 yang belum sempat disetorkan ke Kas Negara, wajib disajikan akrual tahun 2020. Teknis penyetoran PNBP tahun 2020 agar dipisahkan dengan PNBP tahun 2021, dengan tujuan memudahkan setoran PNBP Tahun 2020 yang disajikan secara akrual;
- Rekening koran Biaya Perkara dan Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020, untuk menjelaskan penyajian saldo Laporan Biaya Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga;
- Menatausahakan dan mendigitalisasi seuruh dokumen sumber transaksi keuangan termasuk Memo Penyesuaian dan Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan;
- Back-up* Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA per 31 Desember 2020 setelah dikeluarkan BAR e-Rekon&LK G2 oleh KPPN agar dikirimkan ke Koordinator Wilayah dan mengunggah *Back-up* ke aplikasi Komdanas. Bila terdapat perubahan/perbaikan data keuangan dan aset agar mengirimkan kembali *Back-up* terbaru;
- Pencatatan Aset yang diperoleh dari Bank BTN yang belum tercatat mengacu kepada Surat Edaran Kepala Biro Perlengkapan nomor 554/BUA.4/PL.07/12/2020 tentang Petunjuk Pencatatan Aset Dari Bank BTN;
- Pencatatan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Periode Revaluasi 2020 mengacu kepada Surat Edaran Kepala Biro Perlengkapan nomor 555/BUA.4/PL.C7/2/2020;
- Pengungkapan atas pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta dampak pandemic COVID19 dalam CaLK berpedoman pada surat S-947/PB/2020;
- Waktu/Periode dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 sebagai berikut:

WAKTU/PERIODE DILAKUKAN PENYESUAIAN

No	Pos/Akun-Akun	Periode Penyesuaian	Jurnal Balik Di Awal Tahun
1	Pendapatan Diterima di Muka	Tahunan	Perlu
2	Beban Dibayar di Muka	Tahunan	Perlu
3	Beban yang Masih Harus Dibayar	Tahunan	Perlu
4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Semesteran/Triwulanan/Tahunan	Tidak
5	Penyusutan dan Amortisasi	Semesteran/Tahunan	Tidak
6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
7	Kas di Bendahara Penerimaan	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
8	Reklasifikasi Piutang TGR	Tahunan	Perlu
9	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
10	Persediaan	Semesteran/Tahunan	Tidak
11	Kelebihan Pembayaran Pajak/PNBP	Tahunan	Tidak
12	Uang Muka Belanja	Tahunan	Tidak
13	Piutang PNB/Piutang Lainnya	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA PUSAT
10710; TELEPON (021) 3865130, 3814411; FAKSIMILE (021) 3846402; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-947/PB/2020 30 Desember 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 9 Berkas
Hal : Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Unaudited serta Perlakuan
Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/
Direktur Keuangan/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung
Muda Bidang Pembinaan (Lampiran I)
2. Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat
Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga (Lampiran II)

Dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 (*Unaudited*), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
menyusun dan menyampaikan LKKL yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan
Umum (LK BLU) pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) masing-masing. LKKL
Unaudited disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
2. Sesuai kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait
penyampaian LKKL Tahun 2020 *Unaudited* :
 - a. K/L dengan jumlah satker sampai dengan 10 (sepuluh) satker agar menyampaikan
LKKL paling lambat tanggal 19 Februari 2021 pada jam kerja;
 - b. K/L dengan jumlah satker lebih dari 10 (sepuluh) satker agar menyampaikan LKKL
paling lambat tanggal 28 Februari 2021 pada jam kerja.
3. Penyusunan LKKL Tahun 2020 *Unaudited* berpedoman pada format sebagaimana diatur
dalam BAB III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
4. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyampaian LK setiap entitas akuntansi pada K/L
agar berpedoman pada Lampiran III surat ini.
5. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pada akhir tahun 2020 agar
berpedoman pada Lampiran IV surat ini.
6. Sehubungan dengan pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta dampak pandemi COVID-19 pada laporan
keuangan, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan agar menyajikan secara wajar
realisasi anggaran, hasil operasi, perubahan ekuitas, dan posisi keuangan disertai
pengungkapan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan atas pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta dampak pandemi COVID-19 dalam CaLK berpedoman pada Lampiran V surat ini. CaLK LKKL merupakan kompilasi atas CaLK seluruh entitas akuntansi dalam lingkup tugasnya.

7. Bagi K/L yang memiliki satker BLU, periode pemeriksaan Laporan Keuangan Satker BLU oleh auditor eksternal, agar diselaraskan dengan periode pemeriksaan LKKL Tahun 2020.
8. Bagi K/L yang memiliki transaksi keuangan bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Terencana Luar Negeri (PHLN) agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Periode pemeriksaan LK PHLN (yang disusun oleh *executing agency* di K/L) oleh auditor yang ditunjuk (BPK/Kantor Akuntan Publik) agar diselaraskan dengan periode pemeriksaan LKKL Tahun 2020.
 - b. LK PHLN agar disampaikan kepada auditor yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan bersamaan dengan penyampaian LKKL Tahun 2020 (*Unaudited*) sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
 - c. Dalam rangka penyelarasan penyajian dan pengungkapan atas transaksi keuangan yang bersumber dari PHLN, K/L agar mengungkapkan secara memadai mengenai realisasi belanja, perolehan aset, dan kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan yang bersumber dari PHLN pada Catatan Penting Lainnya di CaLK.
 - d. K/L agar menyusun ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan pada LKKL Tahun 2020 (*Unaudited*) dengan berpedoman pada Lampiran VI dan/atau VII surat ini.
 - e. K/L yang memiliki Program Percepatan Pencegahan *Stunting* (saat ini terdapat di 9 K/L) agar dapat mengungkapkan ikhtisar keuangan program tersebut pada Catatan Penting Lainnya di CaLK dengan berpedoman pada Lampiran VIII surat ini.
 - f. Ketentuan pada butir 8.a sampai dengan 8.e di atas adalah untuk penyusunan LKKL Tahun 2020. Sedangkan, laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing masing *lender/donor* tetap disampaikan sesuai periodisasi, format, dan/atau mekanisme yang ditetapkan oleh masing masing *lender/donor*.
9. Untuk meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2020, setiap K/L agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan telaah atas LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I, hingga K/L. Telaah dilakukan dengan bantuan kertas kerja telaah sebagaimana terdapat pada Lampiran IX surat ini.
 - b. Memastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dan Aplikasi Silabi.
 - c. Menatausahakan piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih per 31 Desember 2020.
 - d. Memastikan bahwa saldo persediaan adalah nilai hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2020.
 - e. Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi keuangan, termasuk Memo Penyesuaian.
 - f. Memanfaatkan menu Profil Kualitas LK pada Aplikasi e-Rekon&LK untuk monitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan, serta validitas data LK.
 - g. Menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada setiap jenjang pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK Pemerintah Pusat.

- h. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian dan kualitas LKKL.
10. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harap Saudara dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar LKKL Tahun 2020 *Unaudited/Audited* dapat disampaikan secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
2. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia
3. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh Indonesia
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang seluruh Indonesia



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-947/PB/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/
KEPALA/WAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Kementerian Pariwisata RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
34.	Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN II
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-947/PB/2020
Tanggal : 30 Desember 2020

DAFTAR INSPEKTUR JENDERAL/INSPEKTUR UTAMA/INSPEKTUR/KEPALA SPI/
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2.	Dewan Perwakilan Rakyat RI
3.	Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI
5.	Mahkamah Agung RI
6.	Mahkamah Konstitusi RI
7.	Komisi Yudisial RI
8.	Kejaksaan Agung RI
9.	Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Kementerian Luar Negeri RI
12.	Kementerian Pertahanan RI
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Kementerian Keuangan RI
15.	Kementerian Pertanian RI
16.	Kementerian Perindustrian RI
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Kementerian Perhubungan RI
19.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Kementerian Kesehatan RI
21.	Kementerian Agama RI
22.	Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Kementerian Sosial RI
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Kementerian Pariwisata RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
34.	Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
35.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Badan Intelijen Negara
38.	Badan Siber dan Sandi Negara
39.	Dewan Ketahanan Nasional
40.	Badan Pusat Statistik
41.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Perpustakaan Nasional
44.	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Kepolisian Negara RI
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Badan Narkotika Nasional
50.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Komisi Pemilihan Umum
55.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Badan Informasi Geospasial
61.	Badan Standardisasi Nasional
62.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Lembaga Administrasi Negara
64.	Arsip Nasional RI
65.	Badan Kepegawaian Negara
66.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Kementerian Perdagangan RI
68.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

No.	Kementerian Negara/Lembaga
69.	Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
74.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Ombudsman RI
77.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Sekretaris Kabinet
81.	Badan Pengawas Pemilu
82.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Badan Keamanan Laut
86.	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

**Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020 *Unaudited***

1. Jadwal *Open/Closed period* rekonsiliasi eksternal periode Desember 2020 (Tahun 2020 *Unaudited*) sebagai berikut:
 - a. **Bagi K/L dengan jumlah satker sampai dengan 10 (sepuluh) satker**
 - 1) *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 6 - 21 Januari 2021 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 15 Februari 2021.
 - 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2021.
 - b. **Bagi K/L dengan jumlah satker lebih dari 10 (sepuluh) satker**
 - 1) *Open period* e-Rekon&LK Tahap I dilaksanakan pada tanggal 6 - 21 Januari 2021 dan *open period* e-Rekon&LK Tahap II pada tanggal 25 Januari - 22 Februari 2021.
 - 2) *Closed period* e-Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 22 - 24 Januari 2021.
 - c. Masa penyelesaian rekonsiliasi dilaksanakan pada tanggal 8 - 24 Januari 2021. Pengenaan sanksi rekonsiliasi mulai tanggal 25 Januari 2021. Pelaksanaan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
 - d. Dalam rangka meningkatkan kualitas data LKKL Tahun 2020, jadwal *open/closed period* di luar jadwal sebagaimana huruf a dan huruf b di atas dapat diberikan berdasarkan permintaan K/L kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui sarana tercepat.
2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 8 - 24 Januari 2021 dapat dilakukan reset BAR apabila masih terdapat dokumen/data transaksi maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR. Selanjutnya satker wajib melakukan rekonsiliasi ulang untuk mendapatkan BAR dari KPPN.
3. Jadwal *open/closed period* e-Rekon&LK dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2020 *Audited* akan diatur lebih lanjut.

4. Batas waktu penyampaian LKKL Tahun 2020 *Unaudited* diatur sebagai berikut:

No.	Tingkat Unit Akuntansi/Pelaporan	K/L dengan jumlah satker sampai dengan 10 (sepuluh) satker	K/L dengan jumlah satker lebih dari 10 (sepuluh) satker
1.	UAKPA	25 Januari 2021	25 Januari 2021
2.	UAPPA-W	1 Februari 2021	5 Februari 2021
3.	UAPPA-E1	10 Februari 2021	17 Februari 2021
4.	UAPA	19 Februari 2021	28 Februari 2021

LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-947/PB/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2020

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini telah diterbitkan ketentuan yang mengatur mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam menghadapi dan pada akhir tahun anggaran 2020, yang dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020.

Namun demikian, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun 2020 ini terdapat beberapa kebijakan dan regulasi khususnya terkait penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang dapat berdampak pula terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2020 serta penyusunan laporan keuangan tahun 2020.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu untuk menyusun pedoman atau petunjuk teknis perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2020 untuk satker non Badan Layanan Umum (non-BLU). Sedangkan pengaturan untuk satker BLU diatur dalam surat terpisah.

Adapun hal-hal yang diatur dalam pedoman atau petunjuk teknis ini antara lain:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2020, yang meliputi jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dan jaminan pemeliharaan.
2. Perlakuan atas beban tahun 2020 yang dibayarkan menggunakan DIPA tahun 2021.
3. Penyajian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing.
4. Penyelesaian atas Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) dan Non PC PEN yang Tidak Menggunakan Akun Khusus.
5. Pencatatan atas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang memperoleh fasilitas perpajakan (pajak ditanggung pemerintah/pajak DTP).
6. Pencatatan dan penyajian hibah langsung yang belum disahkan.
7. Jurnal penyesuaian terkait perolehan BMN berupa jalan, irigasi, dan jaringan melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
8. Pencatatan dan penyajian persediaan berupa cukai, materai, dan leges serta meterai.
9. Pencatatan kas dan setara kas pada bendahara.

Pengaturan lebih detail terkait hal-hal di atas adalah sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut:

- 1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak di Akhir Tahun Anggaran 2020**
 - a. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran**

Pasal 25, 26, dan 27 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2020 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)-nya dibuat tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 wajib dilampiri antara lain asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut.
- 2) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan yang BAST/BAPP-nya dibuat tanggal 17 sampai dengan 31 Desember 2020, asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- 3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) dan 2) tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran diatur sebagai berikut:
 - a) KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
 - b) Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan tersebut, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya (selisih antara nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan) untuk untung kas negara.
 - c) Apabila terdapat kelebihan atas pencairan klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN mengembalikan kelebihan pencairan klaim dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dinyatakan wanprestasi, maka pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran diatur sebagai berikut:
 - a) KPA/PPK menerbitkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan Surat Penetapan Nilai Pengembalian kepada Negara (SPNP).
 - b) Surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak dalam perjanjian/kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- c) SPNP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak dan hasil pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PPK dan/atau konsultan pengawas. Nilai pengembalian kepada negara yang tercantum dalam SPNP adalah sebesar nilai bruto pembayaran yang telah dibayarkan oleh negara namun belum ada prestasi pekerjaan karena adanya wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak.
- d) KPA/PPK menyampaikan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP, dan Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) kepada penyedia barang/jasa sebagai penagihan pertama, dengan tembusan kepada Kepala KPPN mitra kerja dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- e) Berdasarkan surat pernyataan wanprestasi dan/atau pemutusan kontrak, SPNP dan SP3, penyedia barang/jasa melakukan pengembalian ke kas negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3 diterbitkan oleh KPA/PPK.
- f) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e penyedia barang/jasa tidak melakukan pengembalian ke kas negara, pengembalian kepada negara dilakukan melalui klaim jaminan oleh Kepala KPPN berdasarkan surat kuasa klaim/pencairan jaminan dari KPA/PPK sebelum berakhirnya masa klaim sebagaimana diatur dalam surat jaminan berkenaan.

Perlakuan akuntansi terkait kejadian tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur sebagai berikut:

- 1) Satker tidak menyajikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, maka:
 - a) Penyetoran ke kas negara tersebut diperlakukan sebagai pengembalian belanja Tahun Anggaran Berjalan (TAB), dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke kas negara dilakukan oleh KPPN, Bukti Penerimaan Negara (BPN) disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan satker.
 - b) Pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran pengembalian belanja ke kas negara tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan sebagai berikut:

(1) Buku Besar Kas

Pada saat satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai pengembalian/pengurang belanja tahun anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-

K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

(2) Buku Besar Akrual

(a) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan sistem termin/persediaan dalam proses), pencatatan pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja persediaan pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA				

Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi/mengurangi akun Persediaan yang Belum Diregister yang terbentuk pada saat realisasi belanja (pencatatan SP2D pada Aplikasi SAIBA). Atas kondisi ini, seharusnya satker belum melakukan pencatatan persentase persediaan yang belum diterima/belum diselesaikan pekerjaannya pada Aplikasi Persediaan, karena pencatatan pada Aplikasi Persediaan baru dilakukan ketika satker menerima barang disertai BAST. Dengan demikian, satker tidak perlu melakukan koreksi nilai atau kuantitas persediaan pada Aplikasi Persediaan.

ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, perekaman BPN atas pengembalian belanja persediaan secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

K	5218xx/ 523xxx/ 526xxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *)	xxxx	-
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D, sehingga dihasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja persediaan tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5218xx/ 523xxx/ 526xxx	Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan *)	xxxx	-
K	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Persediaan yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan persediaan yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx	Neraca
K	114112	Belanja Barang Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan				

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1171xx	Persediaan	xxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxx	Neraca
Jurnal pendetailan persediaan pada Aplikasi SAKTI				

(b) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja modal, pencatatan pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI adalah sebagai berikut:

i. Aplikasi SAIBA

Pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA				

Apabila belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan/atau Aset Tak Berwujud (ATB) dalam Pengerjaan, maka nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK BMN, satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan atau belanja modal yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi nilai tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE

ii. Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, pencatatan BPN atas pengembalian belanja modal secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
K	53xxxx	Belanja Modal xxx *)	xxxx	-
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAKTI				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Untuk transaksi terkait jaminan akhir tahun anggaran, Aplikasi SAKTI telah mencatat beberapa tahapan transaksi sejak BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D dengan jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE
Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI				

Dengan demikian, perekaman BPN atas pengembalian belanja modal tersebut memerlukan tambahan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx	Belanja Modal xxx	xxxx	-
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal penyesuaian pada Aplikasi SAKTI untuk mengeliminasi Belanja Modal Dibayar di Muka yang tercatat pada saat BAST Bank Garansi				

*) Akun ini ketika diterima oleh Aplikasi e-Rekon&LK dibelokkan menjadi akun Aset yang Belum Diregister dan berdampak pada Neraca.

Selain itu, pencatatan aset tetap/aset lainnya yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan dilakukan melalui perekaman BAST Final yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	114115	Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAKTI untuk mencatat riil penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal pelaporan				

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI				

- (c) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan, pada Buku Besar Akrual dicatat sebagai pengurang beban. Pembukuan BPN atas pengembalian belanja yang tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAIBA dan SAKTI secara otomatis akan membentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	Neraca
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI				

- 3) Apabila pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran dan penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2020, maka:

- a) Pada Neraca per 31 Desember 2020, satker menyajikan Piutang Lainnya sekaligus mengoreksi pencatatan Beban/Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.

- (1) Aplikasi SAIBA

Satker mencatat Piutang Lainnya dengan melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

(a) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

(b) Jika terkait akun belanja modal:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

(c) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, sejak proses perekaman BAST Bank Garansi sampai dengan terbitnya SP2D telah tercatat jurnal akhir sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

Jurnal akhir yang terbentuk sejak pencatatan BAST Bank Garansi sampai dengan realisasi SP2D pada Aplikasi SAKTI

Untuk itu, perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi Belanja Dibayar di Muka menjadi Piutang Lainnya sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
K	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Pengakuan Piutang Lainnya sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya kriteria sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua dan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Atas Piutang Lainnya tersebut, dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar dengan memperhitungkan nilai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran, sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019. Adapun tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tak tertagih dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.

b) Penyesuaian Nilai BMN

(1) Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN

Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke kas negara terkait perolehan KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan, nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK BMN, satker harus melakukan pengurangan nilai KDP dan/atau ATB dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke kas negara melalui Menu Transaksi KDP >> Koreksi Perubahan Nilai KDP.

Atas transaksi koreksi tersebut, Aplikasi SIMAK BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
K	136111/ 162311	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx	Neraca

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar melakukan jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca

K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx	LPE
---	-------------------	---	------	-----

(2) Aplikasi SAKTI

Pada Aplikasi SAKTI, dilakukan pencatatan BMN yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan melalui perekaman BAST Final, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	114112/ 114115	Belanja Barang Dibayar di Muka/ Belanja Modal Dibayar di Muka	xxxx	Neraca

Jurnal yang terbentuk pada saat dilakukan pendetailan persediaan/aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI adalah:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
Jurnal pendetailan aset tetap/aset lainnya pada Aplikasi SAKTI				

c) Penyetoran ke kas negara pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2021)

Penyetoran ke kas negara dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42591x). Apabila penyetoran dilakukan oleh KPPN, BPN disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan satker.

(1) Penyetoran pengembalian belanja tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan pada tahun 2021 sebagai berikut:

(a) Buku Besar Kas

Pada saat satker membukukan BPN, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219711	Utang kepada KUN	xxxx	-

K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	-
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

(b) Buku Besar Akrual

Pada saat satker membukukan BPN atas pengembalian belanja TAYL, Aplikasi SAIBA atau SAKTI secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	LPE
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

Selanjutnya, satker agar melakukan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau Modul GLP Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	42591x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx	LO
K	115212	Piutang Lainnya	xxxx	Neraca
Jurnal pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI untuk mengeliminasi Piutang Lainnya yang telah dicatat pada tanggal 31 Desember 2020				

b. Jaminan Pemeliharaan

Sesuai Pasal 24 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.
- b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 atau yang melampaui tahun anggaran 2020, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2020 dengan dilampiri fotokopi jaminan pemeliharaan yang telah disahkan

oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.

- c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.
- d. Jaminan pemeliharaan harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur dalam PMK yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima.

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Jaminan pemeliharaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b. Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke kas negara oleh satker menggunakan BPN sebagai Pendapatan Anggaran Lain-lain (kode akun 425999).
- c. Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.
- d. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan pada tahun 2020 atau setelah tanggal 31 Desember 2020 direkam pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI berdasarkan BPN, dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

1) Buku Besar Kas:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219711	Utang kepada KUN	xxxx	-
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	-
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LRA
Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI				

2) Buku Besar Akrual:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx	LPE
K	425999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx	LO
Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI				

2. Perlakuan atas Beban Tahun 2020 yang Dibayarkan Menggunakan DIPA Tahun 2021

Pasal 16 Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa:

- a. Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2020 dapat dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA tahun 2020.
- b. Dalam hal satker tidak memiliki besaran UP/TUP dan/atau Bendahara Pengeluaran, belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2020 diatur dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal satker tidak memiliki besaran UP/TUP, satker dapat mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 dengan menggunakan SPM-LS ke Bendahara Pengeluaran. Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2021.
 - 2) Dalam hal satker tidak mempunyai Bendahara Pengeluaran, satker dapat mengajukan pembayaran uang makan dan uang lembur sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 dengan menggunakan SPM-LS kepada penerima. Uang makan dan lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2021.

Perlakuan atas uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 yang dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Sebagaimana dituangkan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban sehingga laporan yang disajikan memenuhi konsep periodisitas. Dengan demikian, beban dapat disajikan sesuai nilai yang sesungguhnya yaitu mencerminkan kewajiban yang terjadi pada periode akuntansi berkenaan, tidak sebatas pada kas yang dibayarkan saja.
- b) Uang makan dan uang lembur tanggal 15 sampai dengan 31 Desember 2020 yang akan dibayarkan menggunakan beban DIPA tahun 2021 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan (31 Desember 2020). Atas hal tersebut, satker agar mencatat dan menyajikannya sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar.
- c) Untuk memastikan nilai Belanja yang Masih Harus Dibayar, satker agar mengidentifikasi berdasarkan dokumen pendukung dan bukan hanya perkiraan atau estimasi. Dokumen pendukung terkait perhitungan uang lembur dan uang makan antara lain daftar hadir pegawai, Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur, Daftar Perhitungan Uang Makan dan Uang Lembur, dan lain sebagainya.
- d) Berdasarkan perhitungan dimaksud, satker melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA atau Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	511129/ 512211	Beban Uang Makan PNS/ Uang Lembur	xxxx	LO
K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dbayar	xxxx	Neraca

Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI

- e) Sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016, jurnal penyesuaian tersebut agar dilakukan jurnal balik pada awal periode selanjutnya.

3. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing

Pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki satker perwakilan di luar negeri, dimungkinkan mengelola UP/TUP dalam bentuk valuta asing (valas) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 160/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Apabila pada tanggal 31 Desember 2020 masih terdapat sisa UP/TUP dalam valas yang belum disetorkan ke kas negara, sesuai PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat maka saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Tata cara penyajian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas pada tanggal pelaporan dilakukan dengan berpedoman pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 Tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Satker perlu memastikan bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valas telah sama dengan nilai nominal dalam valas pada KPPN mitra kerja.
- b. Satker melakukan jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA terhadap akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN, dengan mengakui pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi.
- c. Mengingat bahwa penyesuaian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini harus dilakukan baik oleh satker maupun KPPN mitra, satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing terkait kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Adapun jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs tengah BI lebih besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai pendapatan dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx	LO

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx	LO
K	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx	Neraca

- 2) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs tengah BI lebih kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai beban dilakukan melalui jurnal manual pada Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx	Neraca
K	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx	LO

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx	Neraca
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx	LO

4. **Penyelesaian atas Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) dan Non PC PEN yang Tidak Menggunakan Akun Khusus**

Sesuai Pasal 2 PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease 2019*, untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19. Menindaklanjuti ketentuan dimaksud, telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang menyediakan akun-akun untuk menampung alokasi belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, akun-akun spesifik terkait penanganan pandemi COVID-19 dimaksud ditetapkan pada tanggal 30 November 2020 dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Mengingat bahwa kegiatan yang ditujukan untuk menangani pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan telah diselenggarakan oleh K/L sejak awal tahun 2020 sebelum disediakan akun-akun spesifik terkait PC PEN, serta mempertimbangkan urgensi kegiatan dimaksud, sebagian besar satker telah merealisasikan kegiatan tersebut menggunakan akun yang telah tersedia dalam DIPA (akun-akun non PC PEN). Hal ini sesuai dengan fleksibilitas belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang diatur dalam PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta PMK Nomor 43/PMK.05/2020.

Selanjutnya, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19, satker yang telah merealisasikan belanja PC PEN dengan tidak menggunakan akun-akun khusus PC PEN diwajibkan untuk melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau meralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D). Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyajian informasi atas dampak PC PEN dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.

Namun demikian, sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan belum seluruh satker yang telah merealisasikan belanja PC PEN dengan tidak menggunakan akun-akun khusus PC PEN melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau meralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D). Pada praktiknya di lapangan, terdapat kondisi tertentu sehingga revisi anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D tidak dapat dilakukan. Kondisi dimaksud meliputi:

- a. Satker tidak memiliki sisa pagu anggaran yang cukup untuk direalokasi menjadi akun-akun PC PEN

Untuk kondisi ini, satker telah merealisasikan seluruh atau hampir seluruh pagu anggarannya sehingga tidak terdapat sisa dana sama sekali atau tidak terdapat sisa dana yang cukup untuk direvisi menjadi akun-akun PC PEN. Realokasi tidak dapat dilakukan terhadap pagu anggaran yang telah direalisasikan karena akan berdampak pada munculnya pagu minus.

- b. Ralat akun pada SPM/SP2D memerlukan pemisahan jenis belanja yang berbeda (2 digit akun yang berbeda)

Sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, koreksi atau ralat data transaksi pengeluaran dapat dilakukan terhadap Bagan Akun Standar (BAS) dengan ketentuan:

- 1) Tidak mengakibatkan perubahan jumlah uang dan sisa pagu anggaran pada DIPA menjadi minus;
- 2) Semua segmen BAS dapat diubah kecuali segmen kode satker dan kode KPPN; dan
- 3) Dalam hal transaksi pengeluaran terdapat koreksi potongan penerimaan, semua segmen BAS sisi penerimaan dapat diubah sepanjang tidak merubah jumlah uang.

Ralat akun pada SPM/SP2D yang memerlukan pemisahan jenis belanja (misalnya yang semula nilai total belanja dalam 1 SPM merupakan akun Belanja Modal non PC PEN harus dipecah menjadi akun Belanja Barang PC PEN dan Belanja Modal PC PEN) tidak dapat dilakukan karena akan berdampak pada pemecahan SPM/SP2D. Hal ini dikarenakan sesuai PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 1 SPM hanya untuk 1 jenis belanja. Sedangkan pemisahan atau pemecahan SPM akan berdampak pada perubahan jumlah uang atau nominal SPM, di mana hal ini tidak diperkenankan menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014.

Dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua ketidaktepatan penggunaan akun terkait PC PEN dapat dilakukan revisi anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D, dalam rangka penyajian pos-pos dalam laporan keuangan secara wajar serta penyajian informasi atas dampak PC PEN dalam laporan keuangan tahun 2020 secara memadai, satker dengan

kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat melakukan jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi akun yang tidak sesuai (akun non PC PEN) dan mencatat akun yang seharusnya (akun PC PEN).

Ketidaksesuaian penggunaan akun belanja juga dimungkinkan terjadi atas kegiatan yang tidak terkait PC PEN, di mana hal ini telah diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Ketidaktepatan penggunaan akun belanja untuk kegiatan non PC PEN yang sering terjadi adalah penggunaan akun antara Belanja Modal dengan Belanja Barang khususnya dalam rangka perolehan BMN ekstrakomptabel (BMN dengan harga satuan tidak mencapai batas minimal kapitalisasi).

Ketidaksesuaian penggunaan akun belanja terkait perolehan BMN ekstrakomptabel tersebut dapat menyebabkan timbulnya akun Aset Belum Diregister pada Neraca yang tidak bisa tereliminasi secara otomatis. Terhadap ketidaksesuaian penggunaan akun belanja tersebut, seharusnya dilakukan revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi *output* yang dihasilkan. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2020, dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, agar tidak terjadi salah saji pada laporan keuangan, perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari neraca.

Seluruh jurnal manual yang dilakukan melalui Aplikasi SAIBA atau SAKTI agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dilampiri dokumen pendukung terkait.

Untuk mendukung penyajian informasi dalam laporan keuangan tahun 2020, atas ketidaktepatan penggunaan akun yang ditindaklanjuti dengan jurnal penyesuaian tersebut agar diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Beberapa contoh jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan melalui Aplikasi SAIBA untuk menyelesaikan ketidaktepatan penggunaan akun antara lain:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5xxxxx	Beban xxx – Penanganan Pandemi COVID-19	xxxx	LO
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

Jurnal penyesuaian untuk kondisi: pembelian jasa atau belanja yang tidak menghasilkan BMN dalam rangka PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja yang tidak menghasilkan BMN non PC PEN

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

Jurnal penyesuaian untuk kondisi: pembelian persediaan dalam rangka PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan non PC PEN

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5xxxxx	Beban xxx – Penanganan Pandemi COVID-19	xxxx	LO
K	117911	Persediaan yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
<p>Jurnal penyesuaian untuk kondisi: pembelian jasa atau belanja yang tidak menghasilkan BMN dalam rangka PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan non PC PEN</p>				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	595112/ 595113	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin/ Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	xxxx	LO
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx	Neraca
<p>Jurnal penyesuaian untuk kondisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian barang ekstrakomptabel dalam rangka PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja modal non PC PEN. • Pembelian barang ekstrakomptabel non PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja modal non PC PEN. 				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	xxxx	Neraca
<p>Jurnal penyesuaian untuk kondisi pembelian aset tetap/aset lainnya dilakukan menggunakan akun belanja modal yang tidak sesuai peruntukannya, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelian peralatan dan mesin dalam rangka PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan non PC PEN • Pembelian peralatan dan mesin non PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan non PC PEN 				

Bagi satker pengguna Aplikasi SAIBA, beberapa kondisi berikut tidak memerlukan jurnal penyesuaian:

- Pembelian persediaan dalam rangka PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan persediaan non PC PEN. Hal ini dikarenakan munculnya akun Persediaan yang Belum Diregister telah sesuai.
- Pembelian aset tetap/aset lainnya dalam rangka PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja modal non PC PEN namun sesuai jenis aset tetap/aset lainnya (misalnya pembelian peralatan dan mesin dalam rangka PC PEN dilakukan menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin non PC PEN). Hal ini dikarenakan munculnya akun Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister telah sesuai.

Selain itu, dimungkinkan terdapat variasi ketidaktepatan penggunaan akun selain contoh di atas. Terkait permasalahan dimaksud, dalam hal satker tidak melakukan revisi anggaran dan/atau ralat SPM/SP2D, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Pada satker pengguna Aplikasi SAKTI, ketidaktepatan penggunaan akun belanja pada prinsipnya juga wajib ditindaklanjuti dengan revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi *output* yang dihasilkan.

Namun demikian, apabila sampai dengan tanggal pelaporan tidak lagi dimungkinkan untuk melakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, perlakuan atas ketidaktepatan penggunaan akun pada Aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut:

No	Ketidaktepatan Penggunaan Akun Belanja	Keterangan	Jurnal Penyesuaian secara Manual
1	Ketidaktepatan penggunaan akun 6 (enam) digit untuk belanja modal (misalnya pembelian peralatan dan mesin dilakukan menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan)	Aplikasi SAKTI hanya menggunakan 1 (satu) akun Aset Tetap yang Belum Diregister sehingga tidak terjadi selisih pencatatan	Tidak diperlukan jurnal penyesuaian secara manual.
2	Pembelian aset intrakomptabel dilakukan menggunakan akun belanja barang non persediaan	Aplikasi SAKTI membentuk jurnal Aset Tetap yang Belum Diregister dan aset tetap definitif pada saat penerimaan dan pendetailan barang, namun tidak membentuk jurnal beban. Dengan demikian, tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan jurnal penyesuaian secara manual.
3	Pembelian aset ekstrakomptabel menggunakan akun belanja modal dan/atau belanja barang persediaan	Aplikasi SAKTI membentuk jurnal Beban Aset Ekstrakomptabel pada saat penerimaan dan pendetailan barang. Dengan demikian tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan jurnal penyesuaian secara manual.
4	Pembelian jasa atau non persediaan menggunakan akun belanja modal atau	Kondisi ini tidak mungkin terjadi karena pencatatan belanja modal atau belanja barang persediaan pada Aplikasi SAKTI wajib diikuti	-

	belanja barang persediaan	pemilihan barang (tidak memungkinkan pemilihan jasa atau non BMN).	
5	Pembelian persediaan menggunakan akun belanja barang non persediaan	Aplikasi SAKTI membentuk jurnal Persediaan yang Belum Diregister dan Persediaan definitif pada saat penerimaan dan pendetailan persediaan, namun tidak membentuk jurnal Beban. Dengan demikian, tidak terjadi selisih pencatatan.	Tidak diperlukan jurnal penyesuaian secara manual.

Meskipun tidak mengakibatkan selisih pencatatan, ketidaktepatan penggunaan akun (akun tidak wajar) pada Aplikasi SAKTI dimunculkan dalam MONSAKTI untuk ditindaklanjuti oleh satker.

5. Pencatatan atas Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 yang Memperoleh Fasilitas Perpajakan (Pajak Ditanggung Pemerintah/Pajak DTP)

Sesuai PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19:

- a. Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diberikan kepada pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain) atas impor atau prolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dalam masa pajak April sampai dengan September 2020.
- b. Penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak kepada pihak tertentu ditanggung pemerintah.
- c. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu ditanggung pemerintah.
- d. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak membuat faktur pajak yang memuat keterangan "PPN ditanggung pemerintah eks PMK Nomor .../PMK.03/2020. Selain itu, pengusaha kena pajak membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN ditanggung pemerintah eks PMK Nomor .../PMK.03/2020" dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP).
- e. Pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean membuat SSP) atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPN ditanggung pemerintah eks PMK Nomor .../PMK.03/2020" dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP).
- f. PPh Pasal 22 dipungut oleh pihak tertentu, di antaranya adalah instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- g. Pihak tertentu termasuk badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal

22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 dalam masa pajak April sampai dengan September 2020.

- h. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dilakukan Ditjen Bea dan Cukai tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- i. Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22, di mana pihak tertentu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak tertentu terdaftar, yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 atau Surat Penolakan.
- j. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku sejak PMK Nomor 28/PMK.03/2020 diundangkan dan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan 30 September 2020.
- k. Penghasilan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa imbalan dengan nama dan bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 23.
- l. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu (badan/instansi pemerintah, rumah sakti, atau pihak lain) atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dalam masa pajak April sampai dengan September 2020.
- m. Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan ketentuan di atas:

- 1) Bendahara Pengeluaran pada satker/instansi pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 28/PMK.03/2020 dapat diberikan insentif PPN serta dibebaskan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal 23.
- 2) Hal ini dikarenakan PPN dan PPh tersebut ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07).
- 3) Dengan adanya insentif PPN serta pembebasan dari kewajiban memungut PPh Pasal 22 dan/atau memotong PPh Pasal 23 dimaksud, maka realisasi pembayaran atas pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang membebani DIPA satker adalah sebesar nilai netto (harga barang dan/atau jasa dikurangi PPN dan PPh).
- 4) Atas hal tersebut, satker mencatat pengadaan jasa dan/atau barang sebesar nilai netto yang membebani DIPA satker:

- a) Pengadaan jasa (belanja barang non persediaan)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx	LRA
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Belanja Barang xxx	xxxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	52xxxx	Beban xxx	xxxx	LO
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

- Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA dan SAKTI.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Beban Subsidi

b) Pengadaan barang (belanja modal atau belanja barang persediaan)

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx/ 52xxxx	Belanja Modal xxx/ belanja barang persediaan	xxxx	LRA
K	115612	Piutang dari KPPN	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAIBA, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	53xxxx/ 52xxxx	Belanja Modal xxx/ belanja barang persediaan	xxxx	LRA
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	-

- Jurnal pada buku besar kas Aplikasi SAKTI, dicatat sebesar nilai SP2D yang membebani DIPA satker.
- Di sisi lain, BA 999.07 mencatat Belanja Subsidi dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat Pendapatan Perpajakan.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx	LPE

- Jurnal pada buku besar akrual Aplikasi SAIBA atau SAKTI.
- BMN dicatat sesuai nilai SP2D yang membebani DIPA satker.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	1xxxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	Neraca
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Diregister	xxxx	Neraca

- Pencatatan pembelian BMN pada Aplikasi Persediaan atau SIMAK BMN.
- Pencatatan BAST BMN pada Modul Komitmen dan pendetailan BMN pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap Aplikasi SAKTI.
- BMN dicatat sebesar nilai perolehan, dalam hal ini nilai SP2D yang membebani DIPA satker.

6. Pencatatan dan Penyajian Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Prosedur penatausahaan dan pencatatan hibah langsung bentuk uang/barang/jasa yang diterima selama tahun 2020 telah diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah dan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Sedangkan batas waktu penyelesaian administrasi serta pengesahan hibah langsung yang diterima selama tahun 2020 telah diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2020.

Selain itu, dalam rangka penyelesaian hibah langsung bentuk uang/barang/jasa yang diterima pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-876/PB/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Penyelesaian Hibah Langsung bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu.

Dalam hal masih terdapat hibah langsung bentuk uang/barang/jasa baik yang diterima pada tahun 2020 maupun tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan batas waktu pengajuan pengesahan hibah, satker agar tetap mencatat dan menyajikan saldo Hibah Langsung yang Belum Disahkan dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan di atas.

Pada Aplikasi SAIBA, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan terbentuk secara otomatis ketika satker melakukan perekaman BAST Hibah melalui Modul Komitmen.

Meskipun hibah langsung yang belum disahkan tersebut telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tahun 2020, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban satker untuk menyelesaikan administrasi dan pertanggungjawaban hibah langsung. Hal tersebut tidak pula membebaskan satker dari potensi risiko audit berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 99/PMK.05/2017.

7. Jurnal Penyesuaian terkait Perolehan BMN berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Aplikasi SAIBA

Hingga saat ini, kodefikasi barang untuk mencatat perolehan KDP berupa jalan, irigasi, dan jaringan hanya diakomodasi dalam satu kode barang, yaitu 7010101004 (Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan). Dengan demikian, pencatatan perolehan jalan melalui KDP, irigasi melalui KDP, dan jaringan melalui KDP pada Aplikasi SIMAK BMN hanya dapat di-*mapping* ke satu kode akun aset sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxxx
K	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	xxxx

Di sisi lain, kodefikasi akun belanja serta akun aset terkait jalan, irigasi, dan jaringan telah tersedia untuk masing-masing jenis aset. Dengan demikian, jurnal yang dihasilkan oleh Aplikasi SAIBA pada saat dilakukan perekaman SPM/SP2D dalam rangka perolehan KDP berupa jalan, irigasi, atau jaringan telah merujuk pada masing-masing jenis aset sebagai berikut:

Akun Belanja	Akun Aset Belum Diregister	Akun Aset Definitif
534111 (Belanja Modal Jalan dan Jembatan)	134211 (Jalan dan Jembatan Belum Diregister)	134111 (Jalan dan Jembatan)
534121 (Belanja Modal Irigasi)	134212 (Irigasi Belum Diregister)	134112 (Irigasi)
534131 (Belanja Modal Jaringan)	134213 (Jaringan Belum Diregister)	134113 (Jaringan)

Hal di atas berdampak pada timbulnya saldo Jalan dan Jembatan Belum Diregister, Irigasi Belum Diregister, dan/atau Jaringan Belum Diregister ketika dilakukan pencatatan transaksi perolehan KDP berupa irigasi atau jaringan, karena terdapat ketidaksesuaian akun pada jurnal yang dihasilkan oleh Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA.

Sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-545/PB.6/2016 tanggal 21 Januari 2016 hal Rilis *Update* Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, dan SAIBA dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2015, untuk mengeliminasi saldo Jalan dan Jembatan Belum Diregister, Irigasi Belum Diregister, dan/atau Jaringan Belum Diregister tersebut, satker agar melakukan jurnal penyesuaian melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

a. Perolehan KDP berupa irigasi

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
-----	-----------	-------------	----	-----	-----------	-------------	----

D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	D	134212	Irigasi Belum Diregister	xxx
K	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	xxx	K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx
Jurnal Aplikasi SIMAK BMN				Jurnal Aplikasi SAIBA			

Jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan secara manual melalui Aplikasi SAIBA:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	134212	Irigasi Belum Diregister	xxxx	Neraca

b. Perolehan KDP berupa jaringan

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis oleh Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp
D	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	D	134213	Jaringan Belum Diregister	xxx
K	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	xxx	K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxx
Jurnal Aplikasi SIMAK BMN				Jurnal Aplikasi SAIBA			

Jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan secara manual melalui Aplikasi SAIBA:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	xxxx	Neraca
K	134213	Jaringan Belum Diregister	xxxx	Neraca

Jurnal penyesuaian yang dilakukan secara manual dengan melibatkan akun Jalan dan Jembatan Belum Diregister, Irigasi Belum Diregister, serta Jaringan Belum Diregister akan termonitor oleh Aplikasi e-Rekon&LK sebagai jurnal tidak lazim. Hal ini diperbolehkan, namun wajib dijelaskan secara memadai oleh satker.

8. Pencatatan dan Penyajian Persediaan berupa Cukai, Materai, dan Leges serta Meterai.

Sesuai Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-301/PB.6/2019 tanggal 17 Mei 2019 Hal Rilis Aplikasi SAIBA Tahun 2019 Versi 19.0.0, SIMAK BMN Versi 19.0 dan Persediaan Versi 19.0 dalam Rangka Penyusunan LKKL 2019, disebutkan bahwa dalam rangka menata kembali penggunaan kode barang berupa Pita Cukai, Materai, dan Leges, dilakukan penambahan referensi kode barang sebagaimana diatur dalam Lampiran II KMK

Nomor 231/KMK.06/2018 tentang Perubahan Kedelapan atas Lampiran PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, di mana materai dikelompokkan menjadi dua, yaitu materai untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan materai yang digunakan sebagai barang konsumsi. Dengan demikian, sejak tahun 2019 penggunaan kode barang diatur adalah sebagai berikut:

- a. Kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Materai, dan Leges) yang merupakan persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat digunakan oleh satker-satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pengeluaran persediaan dimaksud dilakukan melalui menu Penyerahan/Penjualan kepada Masyarakat dan akan membentuk Beban Barang untuk Diserahkan, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam LO.
- b. Kode barang 1.01.03.09.001 (Meterai) yang merupakan barang untuk konsumsi digunakan oleh seluruh satker. Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dimungkinkan pula untuk menggunakan kode barang ini. Pengeluaran persediaan ini dilakukan melalui menu Pemakaian, dan akan membentuk Beban Barang Konsumsi, yang disajikan sebagai bagian dari Pos Beban Persediaan dalam LO.

Namun hingga saat ini, masih ditemukan indikasi adanya ketidaktepatan penggunaan kode barang di satker yang dapat berdampak pada pencatatan akun beban yang tidak tepat, yaitu adanya Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (593121) pada satker di luar lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Untuk itu, bagi satker yang mengalami hal ini agar melakukan jurnal koreksi dari akun Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges (593121) menjadi Beban Persediaan konsumsi (593111). Jurnal koreksi agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan dilampiri dokumen pendukung terkait. Selanjutnya, atas persediaan yang belum digunakan agar dilakukan reklasifikasi kode barang dari 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Materai, dan Leges) menjadi 1.01.03.09.001 (Meterai).

Adapun jurnal koreksi antar beban adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	593111	Beban Persediaan Konsumsi	xxxx	LO
K	593121	Beban Persediaan Pita Cukai, Materai, dan Leges	xxxx	LO

Sedangkan jurnal yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi adalah sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
K	117121	Pita Cukai, Materai, Leges	xxxx	Neraca

Jurnal reklasifikasi keluar

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
-----	-----------	-------------	----	---------

D	117111	Barang Konsumsi	xxxx	Neraca
K	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
Jurnal reklasifikasi masuk				

Bagi satker lingkup Ditjen Pajak dan/atau Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar memastikan bahwa kode barang 1.01.05.01.001 (Pita Cukai, Materai, dan Leges) telah digunakan sesuai peruntukannya. Dalam hal barang berupa pita cukai, materai, dan leges yang diniatkan untuk dijual/diserahkan masih dicatat menggunakan kode barang lain, satker agar melakukan reklasifikasi, sehingga terbentuk jurnal sebagai berikut:

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
K	117xxx	Barang Persediaan xxx	xxxx	Neraca
Jurnal reklasifikasi keluar				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	117121	Pita Cukai, Materai, Leges	xxxx	Neraca
K	319151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxxx	LPE
Jurnal reklasifikasi masuk				

9. Pencatatan Kas dan Setara Kas pada Bendahara

Sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L antara lain terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, serta Kas dan Setara Kas Lainnya. Kas dan Setara Kas Lainnya pada K/L mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dari Hibah, serta Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Perlakuan dan pencatatan atas Kas dan Setara Kas telah diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.06/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Adapun pengaturan mengenai pencatatan dan penyajian Kas dan Setara Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan, dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka oleh K/L dan juga pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening bendahara namun belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang

terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Sedangkan untuk pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

- 1) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan bunga atau jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	xxxx	LO

- 2) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan pungutan/potong pajak oleh Bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	xxxx	Neraca

- 3) Saldo pada Rekening Bendahara Pengeluaran yang merupakan uang pihak ketiga namun belum diserahkan kepada yang berhak.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 4) Terdapat saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAYL atau TAB.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari belanja TAB				

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
-----	-----------	-------------	----	---------

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	42591x	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian yang dicatat dalam hal hak pemerintah tersebut berasal dari belanja TAYL				

- 5) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan menurut perjanjian harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 6) Saldo pada Rekening Penampungan yang masih akan dibayarkan oleh pihak penerima dana kepada pihak ketiga (penyedia barang/jasa) berdasarkan tagihan yang telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 7) Saldo pada Rekening Penampungan yang tidak digunakan untuk kegiatan kerja sama/kemitraan dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNPB Lainnya	xxxx	LO
Jurnal penyesuaian ini dicatat oleh K/L penerima dana kerja sama/kemitraan				

- 8) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah

- 9) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBP Lainnya	xxxx	LO

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk melalui perekaman pada Modul Bendahara.

b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan, baik yang telah maupun belum menjadi hak pemerintah, misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya pada K/L.

Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, saldo yang terdapat dalam rekening yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk pasangan jurnalnya ditentukan berdasarkan kondisinya, antara lain:

- 1) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan pungutan/potongan pajak oleh Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	xxxx	Neraca

- 2) Saldo pada Rekening Bendahara Penerimaan yang merupakan belanja yang sudah dicairkan dari rekening kas negara ke rekening Bendahara Penerimaan namun belum diserahkan kepada pihak ketiga yang berhak.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx	Neraca

- 3) Saldo pada Rekening Penyaluran Dana Bantuan yang harus disetorkan ke kas negara karena merupakan hak pemerintah yang berasal dari belanja TAB.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

- 4) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah

- 5) Saldo pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, dan/atau Rekening Penampungan Sementara yang telah dapat diakui sebagai hak pemerintah dan akan disetorkan ke kas negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	xxxx	Neraca
K	425xxx	Pendapatan PNBPN Lainnya	xxxx	Neraca

Jurnal-jurnal terkait Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, jurnal-jurnal tersebut terbentuk melalui perekaman pada Modul Bendahara.

c. Kas Lainnya dari Hibah

Kas Lainnya dari Hibah dapat berupa kas dari pemberi hibah yang belum atau telah dilakukan pengesahan. Kas dari pemberi hibah yang telah dilakukan pengesahan dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah (kode akun 111822) dalam neraca, di mana pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis pada saat dokumen pengesahan hibah langsung (SPHL) telah terbit.

Sedangkan untuk kas dari pemberi hibah yang belum dilakukan pengesahan dicatat sebagai Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan (kode akun 111827) dalam

neraca. Pencatatan dimaksud dilakukan secara manual melalui Aplikasi SAIBA pada saat kas diterima dari pemberi hibah. Sedangkan pada Aplikasi SAKTI, pencatatan tersebut terbentuk secara otomatis ketika satker melakukan perekaman BAST Hibah melalui Modul Bendahara. Untuk lebih detailnya, pencatatan Kas Lainnya dari Hibah agar dilakukan dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Selain Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan, serta Kas Lainnya dari Hibah, dimungkinkan terdapat kas dan setara kas yang dikelola oleh satker di K/L, yang teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya. Dana tersebut terikat pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Saldo kas yang memenuhi definisi dana yang dibatasi penggunaannya dicatat dan disajikan sebagai Aset Lainnya di neraca. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga, pencatatan dana yang dibatasi penggunaannya berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	163xxx	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxxx	Neraca
K	5xxxxx	Beban xxx	xxxx	LO

- 2) Dana yang dibatasi penggunaannya pada Rekening Penampungan Dana Titipan, Rekening Penampungan Dana Jaminan, atau Rekening Penampungan Sementara, yang berdasarkan ketentuan belum/tidak menjadi hak negara dan masih dimungkinkan untuk dikembalikan kepada pihak pemilik dana.

D/K	Kode Akun	Uraian Akun	Rp	Laporan
D	163xxx	Dana yang Dibatasi Penggunaannya	xxxx	Neraca
K	212192	Dana Pihak Ketiga	xxxx	Neraca

Jurnal penyesuaian ini dibuat dalam rangka kepraktisan karena belum adanya kepastian apakah Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan hak atau kewajiban pemerintah

Selain itu, untuk keperluan penyeragaman kebijakan akuntansi atas uang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah (pemda), khususnya terkait penyajian kas yang belum disalurkan kepada penerima atau telah disalurkan namun belum diterima laporan pertanggungjawabannya pada tanggal pelaporan, telah diterbitkan Surat Dirjen Perbendaharaan mengenai Kebijakan Akuntansi atas Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda untuk Diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 dan Selanjutnya, untuk dipedomani oleh seluruh satker.

Pengungkapan Terkait Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19

1. Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau PEN. Pelaksanaan PC - PEN tersebut meliputi sektor sebagai berikut:
 - a. sektor kesehatan (dilaksanakan oleh K/L)
 - b. sektor perlindungan sosial (dilaksanakan oleh K/L)
 - c. sektor dukungan sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (dilaksanakan oleh K/L dan BUN)
 - d. sektor insentif usaha (dilaksanakan oleh BUN)
 - e. sektor dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (dilaksanakan oleh BUN), dan
 - f. sektor pembiayaan korporasi (dilaksanakan oleh BUN)
2. Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN serta dampak pandemi COVID-19 pada laporan keuangan pemerintah selanjutnya diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC - PEN terhadap suatu entitas pemerintah.
3. Setiap entitas akuntansi dan pelaporan keuangan mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (*output*) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC - PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjabar dan pelengkap atas lembar muka Laporan Keuangan.
4. Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan beban pada CaLK LO, namun juga dampaknya terhadap penyajian saldo pos-pos keuangan pada CaLK LPE dan CaLK Neraca.

5. K/L agar memberikan penjelasan pada bagian CaLK Pendahuluan terkait:

a. Capaian *output* strategis pada masing-masing K/L

Contoh:

- Penjelasan capaian *output* strategis K/L

Selama periode Tahun Anggaran 2020, output strategis yang telah dicapai oleh Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output
1	002	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Prioritas Nasional	Rp xxxx	Rp xxxx	xx,xx %	xx paket	xx paket	xx,xx %
dst								

b. *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta *output* pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk masing-masing K/L penerima alokasi anggaran PC PEN

Contoh:

- Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

- 1) Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp xxxx
- 2) Insentif tenaga medis pusat sebesar Rp xxxx
- 3) Santunan kematian tenaga medis sebesar Rp xxxx
- 4) Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas COVID-19/Satuan Tugas COVID-19 sebesar Rp xxxx

Contoh:

- Penjelasan capaian *output* pelaksanaan PC PEN

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada sektor kesehatan, output yang telah dicapai sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Progres Capaian Output
1	508	Alat Kesehatan	Rp xxxx	Rp xxxx	xx,xx %	xx unit	xx unit	xx,xx %
2	512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Rp yyyy	Rp yyyy	yy,yy %	yy paket	yy paket	yy,yy %
dst								

6. Pengungkapan terkait dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC-PEN dalam CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh mulai dari level UAKPA s.d. UAPA dapat mencakup, antara lain:

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
1.	Laporan Realisasi Anggaran		
a.	Pagu Belanja	Perubahan pagu belanja atas kebijakan <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) terkait pelaksanaan PC PEN	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Belanja Pagu Awal sebelum <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN Jumlah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN Pagu akhir setelah <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran dan/atau tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN Penjelasan bilamana terdapat tambahan alokasi melalui pergeseran anggaran dari BA BUN yang belum masuk dalam DIPA K/L Penjelasan atas penyerapan anggaran
b.	Realisasi Belanja	Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Belanja Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Belanja Jumlah
c.	Estimasi Pendapatan	Kenaikan/penurunan estimasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Pendapatan Jumlah

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
	(Perpajakan dan/atau PNBP)	PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Revisi estimasi pendapatan
d.	Realisasi Pendapatan	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Pendapatan Realisasi pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun 2019. Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
2. Laporan Operasional			
a.	Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP)	Kenaikan/penurunan realisasi Pendapatan (Perpajakan dan/atau PNBP) terkait dampak Pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) Jumlah pendapatan (perpajakan dan/atau PNBP) tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun 2019. Penjelasan penyebab kenaikan/penurunan realisasi
b.	Beban	Yang menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Beban Jumlah
		Yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Beban Jumlah
3. Laporan Perubahan Ekuitas			
a.	Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar)	Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, meliputi persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Transfer Antar Entitas (Transfer Masuk - Transfer Keluar) Satker yang melakukan Transfer Masuk, kuantitas, dan nilai nominal Satker yang melakukan Transfer Keluar, kuantitas, dan nilai nominal Penjelasan atas selisih, jika ada
b.	Pengesahan Hibah Langsung	Hibah langsung berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L tertentu dalam rangka penanganan COVID-19 akan berdampak pada kenaikan pengesahan hibah langsung.	<ul style="list-style-type: none"> Jenis penerimaan hibah langsung Tanggal perjanjian hibah langsung Pihak pemberi hibah Estimasi penerimaan hibah langsung Tahun 2020 Realisasi penerimaan dan pengesahan hibah langsung sampai dengan Tahun 2020, dan perbandingan dengan Tahun 2019

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
4.	Neraca		
a.	Piutang Perpajakan	Kenaikan/penurunan piutang perpajakan termasuk pada penyajian penyisihan piutang tak tertagih.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Piutang Perpajakan • Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2020 • Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun lalu
b.	Piutang PNBP	Penagihan Piutang PNBP yang terhambat karena dampak pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan jumlah penyisihan piutang dan piutang yang mengalami penurunan kualitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Piutang PNBP • Jumlah bruto, penyisihan piutang dan neto per 31 Desember 2020 • Penjelasan atas kenaikan/penurunan dibandingkan saldo tahun lalu
c.	Persediaan	Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, antara lain sisa pembelian, transfer masuk, atau hibah masuk berupa persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang belum terpakai/terdistribusikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 • Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 • Sumber perolehan persediaan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
d.	Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Gedung dan Bangunan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 • Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 • Sumber perolehan Gedung dan Bangunan (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
e.	Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Peralatan dan Mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 • Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019

No.	Data	Uraian	Jenis Pengungkapan
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber perolehan Peralatan dan Mesin (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
f.	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Aset Tetap Lainnya dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 • Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 • Sumber perolehan Aset Tetap Lainnya (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
g.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	Penyelesaian KDP yang terhambat sebagai dampak perubahan alokasi anggaran belanja modal.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, nilai, dan jenis pekerjaan. • Realisasi pekerjaan sampai dengan Tahun 2020 dan perbandingan dengan Tahun 2019. • Penyebab tertundanya penyelesaian KDP • Kemungkinan tindak lanjut pengembangan atau penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya
h.	Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud	Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis Aset Tak Berwujud dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 • Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019 • Sumber perolehan Aset Tak Berwujud (Pembelian, TK-TM, atau Hibah)
i.	Utang Kepada Pihak Ketiga	Utang Kepada Pihak Ketiga yang berasal dari belanja penanganan pandemi COVID-19 yang secara signifikan belum terbayar.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah per 31 Desember 2020 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2019. • Kemungkinan tindak lanjut penyelesaian kewajiban pada tahun anggaran berikutnya
j.	<p>Pos-pos lainnya di Neraca yang terdampak</p> <p>Contoh: Misal di Kementerian ABCD terdapat Pos Aset Lainnya berupa Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dari Rekening Penampungan, yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga mendapatkan dispensasi perpanjangan untuk penggunaannya.</p>		

7. Catatan Penting Lainnya atas LRA terkait informasi :
- a. Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC PEN:
 - 1) yang menggunakan akun khusus COVID-19, dan/atau
 - 2) yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19
 - b. Koreksi akuntansi yang dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan akuntansi akhir tahun dalam Lampiran IV surat ini.
 - c. Informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja menggunakan akun-akun khusus COVID-19.

Informasi dimaksud dapat dituangkan sesuai format berikut:

IDENTIFIKASI ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PC - PEN

Identifikasi dimaksudkan untuk menghimpun seluruh informasi alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi merupakan belanja dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC - PEN. Jurnal penyesuaian dilakukan terhadap alokasi dan realisasi yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19 untuk menyajikan informasi beban penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC - PEN terkait secara wajar dalam laporan keuangan. Hasil identifikasi baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	dst			
B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
2	52xxxx			Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
3	53xxxx			Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
4	53xxxx			Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi (kas)	Keterangan
5	57xxxx			Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
6	57xxxx			Telah dilakukan jurnal penyesuaian secara manual
7	dst			
	Total Alokasi Anggaran dan Realisasi PC PEN			

Kendala tidak dapat dilakukannya revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi ke akun Khusus COVID-19:

Contoh:

B.1 = Revisi tidak dilakukan karena akan berdampak pada pagu minus untuk akun 52xxxx

B.2 = Revisi tidak dilakukan ke Akun Khusus COVID-19 (Belanja Barang dan Belanja Modal) karena pengadaan peralatan dalam rangka COVID-19 dalam satu dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) menggunakan akun Belanja Barang

LAMPIRAN VI

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-947/PB/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN XXX
PER 31 DESEMBER 2020**

		LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah *)
1	Nama Pinjaman Luar Negeri
2	Pemberi Pinjaman
3	Nama Proyek
4	<i>Loan ID</i>
5	No. Register
6	<i>Date Sign</i>
7	<i>Date Effective</i>
8	<i>Closing Date</i>
9	<i>Loan Amount</i>
10	<i>Disbursement s.d 2019</i>
11	<i>Disbursement pada tahun 2020</i>
12	Belanja Tahun 2020 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang
	c. Belanja Modal
	d. Belanja Bansos
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar
	b. Aset Tetap
	c. Aset Lainnya
	d. Kewajiban
14	<i>Executing Agency</i>
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)

Isian Lampiran VI ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri menggunakan data realisasi Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2020, disampaikan kepada:

- Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01;
- K/L koordinator *Project/Program Loan*, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- Auditor BPK masing-masing PHLN terkait.

Keterangan :

- Diisi dengan nama Pinjaman Luar Negeri
- Diisi dengan nama pemberi pinjaman (*Lender*)
- Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan pinjaman
- Diisi dengan *Loan ID*
- Diisi dengan Nomor Register Pinjaman
- Diisi dengan tanggal Penandatanganan Pinjaman
- Diisi dengan tanggal efektif pinjaman
- Diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman
- Diisi dengan nilai pinjaman (*loan*)
- Diisi dengan Penarikan Pinjaman s.d tahun 2019
- Diisi dengan Penarikan Pinjaman dalam tahun 2020
- a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri
- a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri

*) Dalam hal ikhtisar LK PLN lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah"

- 13.b. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 13.c. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri
- 14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
- 15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPK / BPKP / KAP)

LAMPIRAN VII

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-947/PB/2020

Tanggal : 30 Desember 2020

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN XXX
PER 31 DESEMBER 2020**

		LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah *)
1	Nama Pinjaman Luar Negeri
2	Pemberi Pinjaman
3	Nama Proyek
4	<i>Loan ID</i>
5	No. Register
6	<i>Date Sign</i>
7	<i>Date Effective</i>
8	<i>Closing Date</i>
9	<i>Loan Amount</i>
10	<i>Disbursement s.d 2019</i>
11	<i>Disbursement pada tahun 2020</i>
12	Belanja Tahun 2020 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang
	c. Belanja Modal
	d. Belanja Bansos
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar
	b. Aset Tetap
	c. Aset Lainnya
	d. Kewajiban
14	<i>Executing Agency</i>
15	Pemeriksa (BPK / BPKP / KAP)

Isian Lampiran VII ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri menggunakan data realisasi Hibah Luar Negeri per 31 Desember 2020, disampaikan kepada:

- Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01;
- K/L koordinator *Project/Program Loan*, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- Auditor BPK masing-masing PHLN terkait.

Keterangan :

- Diisi dengan nama Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan nama pemberi Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan *Loan ID*
- Diisi dengan Nomor Register Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan tanggal Penandatanganan Perjanjian Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan tanggal efektif Perjanjian Hibah
- Diisi dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan nilai Hibah Luar Negeri
- Diisi dengan Penarikan Hibah s.d tahun 2019
- Diisi dengan Penarikan Hibah dalam tahun 2020
- a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Hibah Luar Negeri
- a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri

*) Dalam hal ikhtisar LK HLN lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah"

- 13.b. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.c. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Hibah Luar Negeri
- 14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*
- 15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPK / BPKP / KAP)

Pengungkapan terkait Program Percepatan Pencegahan *Stunting*

1. Pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan Bank Dunia untuk melakukan kegiatan percepatan pencegahan anak kerdil (*stunting*) melalui pinjaman *Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY)* dengan mekanisme *Program for Result (PforR)*.
2. Dari 23 K/L yang terkait dengan Program INEY, saat ini hanya terdapat 9 K/L yang relaisasi belanjanya berkaitan dengan *Dishbursement Linked Indicators (DLI)* dari pelaksanaan Program INEY, sebagai berikut:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 - d. Kementerian Keuangan selaku BA 999.05 (Belanja Transfer)
 - e. Kementerian Kesehatan
 - f. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - g. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - h. Kementerian Sosial
 - i. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Bagi 9 K/L sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas agar menyampaikan LKKL yang dilengkapi dengan pengungkapan terkait program percepatan pencegahan *stunting* pada CaLK, yaitu pada bagian Catatan Penting Lainnya, dengan menggunakan data hasil penandaan (*tagging*).
4. LKKL yang dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program percepatan pencegahan *stunting* disampaikan kepada:
 - a. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai bagian dari LKKL;
 - b. Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01 dan 999.02 ;
 - c. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden dan *softcopy* melalui alamat email info@stunting.go.id;
 - d. Auditor BPK Program Percepatan Pencegahan *Stunting*.
5. Untuk kepentingan audit BPK, atas laporan keuangan dari K/L yang terkait dengan program percepatan pencegahan *stunting* dilakukan konsolidasi.
6. Format pengungkapan program percepatan pencegahan *stunting* adalah sebagai berikut:

1. FORMAT UNTUK KEMENTERIAN KEUANGAN SELAKU BA BUN BELANJA TRANSFER (BA 999.05)

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN (DJPK)

1.1. PROGRAM/KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT ¹	Jumlah Kabupaten/Kota	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Penyaluran ²	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik					
	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) NON Fisik					
	TOTAL					

¹ Nama Program/Kegiatan /Output atas Jenis Bidang DAK Stunting Tahun 2020, mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK terkait Stunting Tahun 2020.

² Data realisasi penyerapan DAK Stunting sampai 31 Desember 2020 di daerah masih berproses sesuai dengan mekanisme pelaporan DAK (seperti UP) yang akan melewati tahun berjalan (N+1), sehingga diusulkan terkait realisasi adalah **Realisasi Penyaluran**.

2. FORMAT UNTUK K/L NON KEMENKEU

NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA:

2.1 PROGRAM/KEGIATAN, PAGU DAN REALISASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT				Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
(a)	(b)				(c)	(d)	(e)	(f)
A.	Jenis Intervensi³ : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis							
	Kode Program	Nama Program						
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan					
	Kode Output		Nama Output					
B	Jenis Intervensi⁴ : Intervensi Spesifik atau Intervensi Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis							
TOTAL								

³ Jenis Intervensi: Intervensi Spesifik atau Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis (sesuai hasil tagging yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemenkeu Tahun Anggaran 2020)

⁴ Untuk Jenis *Intervensi lainnya* apakah Intervensi Spesifik atau Sensitif atau Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis (sesuai hasil tagging yang dilakukan oleh Bappenas dan Kemenkeu Tahun Anggaran 2020)

Telaah Laporan Keuangan

Telaah Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan memeriksa laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan untuk meyakini keandalan laporan keuangan yang disusunnya sebelum disampaikan ke jenjang/unit akuntansi di atasnya. Telaah Laporan Keuangan dilakukan oleh seluruh penyusun laporan keuangan, mulai dari level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA, hingga penyusun LKPP. Pereviu laporan keuangan (APIP) dapat juga menggunakan telaah laporan keuangan ini sebagai tambahan dalam melakukan reviu atas laporan keuangan.

Adanya aplikasi e-Rekon&LK membuat Telaah Laporan Keuangan dapat dilakukan setiap saat sepanjang masa penyusunan laporan keuangan. Beberapa telaah yang dahulunya dilakukan secara manual, dengan memanfaatkan aplikasi e-Rekon&LK telaah dapat dimonitor melalui aplikasi e-Rekon&LK. Dalam rangka telaah LK, maka UAPPAW, UAPPA-E1 dan UAPA dapat memiliki lebih dari satu *user* dengan melakukan permintaan *user* kepada Kanwil DJPb dan Dit. APK.

Telaah Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga keandalan Laporan Keuangan. Kementerian Keuangan telah membuat contoh Format Kertas Kerja Telaah laporan Keuangan yang dapat disesuaikan sesuai level Satker/Wilayah/Es.1, dan atau K/L dengan:

- a. Perubahan kebijakan akuntansi;
- b. Perubahan aplikasi penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Kondisi dan karakteristik masing-masing Satker/Wilayah/Eselon-1/Kementerian Negara/Lembaga.

Kertas Kerja disusun dengan memberi tanda pada kolom isian “sama/tidak sama” atau “ada/tidak ada”. Bila tidak terdapat datanya, diisi dengan N/A (*Not Available*). Pada kertas kerja juga terdapat kolom pengisian “yang seharusnya”. Hal ini karena Telaah Laporan Keuangan berfungsi sebagai pencegahan dini atas potensi terjadinya kesalahan. Apabila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, hal ini merupakan indikasi kuat terdapat suatu kesalahan walaupun belum tentu salah, agar lakukan:

- a. Teliti apakah terjadi kesalahan? Jika ya, lakukan perbaikan pada sumber/satker yang salah, *upload* ulang perbaikannya, kemudian lakukan telaah laporan keuangan kembali.
- b. Apabila kesalahan tidak dapat diperbaiki, konsultasikan dengan unit akuntansi di atasnya untuk dicarikan solusi, jelaskan dalam Lampiran Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan.

Jika diperlukan, kertas kerja telaah laporan keuangan dilampirkan dalam lampiran pendukung laporan keuangan di tiap jenjang laporan keuangan.

Contoh Format Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan terdapat pada halaman berikut ini.

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KL
PERIODE TA. 2020 UNAUDITED

Kode BA dan Nama BA : (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP			
2. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE face			Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)			Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<p><i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i></p>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya \leq akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung \geq akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<p><i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i></p>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<p><i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i></p>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan			Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			
5 Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>			
6.. Apakah terdapat pengeluaran belanjaan untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanjaan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()

NIP

.....

Penelaah,

()

NIP

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT ESELON I
PERIODE TA. 2020 *UNAUDITED*

Kode BA dan Nama BA : (.....)
 Kode Es1 dan Nama Es1: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
1. Pernyataan Tanggung Jawab		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrua		Ada
2. Neraca Percobaan Kas		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu <i>Daftar >> Akun Non Ref</i>)		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu " <i>Daftar >> Saldo Tidak Normal</i> "), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i>)		Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<p><i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i></p>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya \leq akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung \geq akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<p><i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i></p>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<p><i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i></p>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)			
3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()

NIP

.....

Penelaah,

()

NIP

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT WILAYAH
PERIODE TA. 2020 *UNAUDITED***

Kode BA dan Nama BA : (.....)
 Kode Es1 dan Nama Es1: (.....)
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face			Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua			Ada
2. Neraca Percobaan Kas			Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE			Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca			Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.			Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)			Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<p><i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i></p>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya \leq akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung \geq akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<p><i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i></p>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<p><i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i></p>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)			
3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()

NIP

.....

Penelaah,

()

NIP

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE TA. 2020 *UNAUDITED***

Kode BA dan Nama BA : (.....)
 Kode Es1 dan Nama Es1: (.....)
 Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (.....)
 Kode Satker dan Nama Satker: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
1. Pernyataan Tanggung Jawab		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrua		Ada
2. Neraca Percobaan Kas		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2019?		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak
1. Adakah Satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE		Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2020)			Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Tidak
<p><i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i></p>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya \leq akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan			Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap			Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya			Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung \geq akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya
<p><i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i></p>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK			0
<p><i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i></p>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan			0
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?			Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx			Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621			Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx			Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998			Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL			Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, <i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>			Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>			Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah			Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>			Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?			Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"			Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>			Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>				
5.	Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)			Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?			Ya

LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"			Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?			Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2019, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?			Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?			Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?			Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?			Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2020 di e-Rekon&LK?			Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)			
3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")				
MENU DAFTAR BMN		Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?		Tidak		
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)				
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")				Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?				Tidak
Pengecekan TDK				
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?				Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS				Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo				Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>				
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Satker Konsolidasian		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2019 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?				
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?				
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?				Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?				Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan				Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)				Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?				Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?				Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?				Ya
8.				Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?			Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9. Apakah belanja dalam rangkai penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2020 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2020			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19			
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19			
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19			
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19			
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19			

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		Ada	Tidak
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		Ada	Tidak
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()

NIP

.....

Penelaah,

()

NIP

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran

Lampiran III

BA : (005) Mahkamah Agung
Eselon I :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2020			KET	
					Tunai	Saldo Bank			Total
						Saldo	Bank dan No Rek		

....., Januari 2021
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Lampiran IV

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2020			KET	
					Tunai	Saldo Bank			Total
						Saldo	Bank dan No Rek		

....., Januari 2021
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerima

Lampiran V

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2020			KET	
					Tunai	Saldo Bank			Total
						Saldo	Bank dan No Rek		

....., Januari 2021
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Lampiran VI

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2020			KET
					Tunai	Saldo Bank		
						Saldo	Bank dan No Rek	

....., Januari 2021
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

**DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG PNBP
per 31 Desember 2020**

Lampiran VII

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang PNBP	Nilai agunan/ sitaan yang diperhitungkan	Saldo Piutang setelah agunan/ sitaan	Penyisihan Piutang				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
						5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Sewa Kantin	300.000	-	300.000	1.500	-	-	-	1.500	Lancar
2	Bapak B	Sewa Kantin	2.000.000	-	2.000.000	-	200.000	-	-	200.000	Kurang Lancar
3	Bapak C	Sewa Kantin	3.500.000	-	3.500.000				3.500.000	3.500.000	Macet

....., Januari 2021
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

**DAFTAR PERHITUNGAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR
per 31 Desember 2020**

Lampiran VIII

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2020	Sisa TP/TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
							5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Kehilangan mobil	81.000.000	57.375.000	23.625.000	13.500.000	67.500	-	-	-	67.500	Lancar
2	Bapak B	Kehilangan motor	9.200.000	7.666.680	1.533.320	1.533.320	7.667	-	-	-	7.667	Lancar
3	Bapak C	Kehilangan mobil	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	Macet

....., Januari 2021
Sekretaris.....

.....
NIP.....

**DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TP/TGR
per 31 Desember 2020**

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2020	Sisa TP/TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
								5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Kehilangan mobil	81.000.000	57.375.000	23.625.000	13.500.000	10.125.000	50.625	-	-	-	50.625	Lancar
2	Bapak C	Kehilangan mobil	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-	-	200.000.000	200.000.000	Macet

....., Januari 2021
Sekretaris.....

.....
NIP.....

**KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
per 31 Desember 2020**

Lampiran IX

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Uraian	Nilai SSBP	Jangka Waktu (Bulan)	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		Pendapatan Diterima di Muka
						s.d 31 Desember 2019	Tahun Berjalan 2020	
1	Sewa ATM BRI	24.000.000	24	01 November 2019	01 November 2021	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2	Sewa Lahan	18.000.000	18	01 December 2019	25 November 2021	1.000.000	12.000.000	5.000.000
3	Sewa Ruang/Gedung	120.000.000	60	01 November 2020	3 January 2022	4.000.000	24.000.000	92.000.000

....., Januari 2021
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

**KARTU RINCIAN BELANJA BARANG DIBAYAR DI MUKA (SEWA RUMAH DINAS)
per 31 Desember 2020**

Lampiran X

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :
Wilayah :
Satuan Kerja :

No	Nama Pegawai	Nilai SP2D	Lama Angsuran (bulan)	Angsuran per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (bulan)	Total Angsuran (rupiah)	Sisa Angsuran (bulan)	Sisa Angsuran (rupiah)	Rincian Angsuran per Akun 522141	Jumlah Saldo Akhir
1	Rmh Dns Wakil Ketua	30.000.000	24	1.250.000	02 Januari 2019	02 Januari 2021	12	15.000.000	12	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Rmh Dns Tipikor	12.000.000	12	1.000.000	21 November 2019	21 November 2020	2	2.000.000	10	10.000.000	10.000.000	10.000.000

....., Januari 2021
Sekretaris.....

.....
NIP.....

**KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
per 31 Desember 2020**

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2018	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	939.600	SPM NO: 00005 TANGGAL 19-01-2021 SK DIRJEN BADILAG NO: 1716/DJU/SK/KP04.1/10/2018 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS	Kekurangan Gaji 3 Bulan atas kenaikan pangkat nama Bapak/Ibu
						511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93.960		
						511122	Belanja Tunj. Anak PNS	26.226		
						511125	Belanja Tunj. PPh PNS	30.210		
2	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2018	511129	Belanja Uang Makan PNS	21.844.000	SPM NO: 00005 TANGGAL 19-01-2021	Susulan uang makan bulan Desember 2020
3	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2018	522111	Belanja Langganan Listrik	11.826.900	REKENING TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 7 JANUARI 2021	Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2020
4	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2018	522112	Belanja Langganan Telepon	564.960	REKENING TAGIHAN TELEPON TANGGAL 8 JANUARI 2021	Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2020
5	AAAA	BBBBBB	CCCCCC	DDDDDD	2018	522113	Belanja Langganan Air	71.000	REKENING TAGIHAN AIR TANGGAL 8 JANUARI 2021	Beban Langganan Air Bulan Desember 2020
JUMLAH TOTAL								35.396.856		

....., Januari 2021
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

KOREKSI BEBAN LO TAHUN 2020

No	KDBAES1	KORWIL	KODE	SATKER	AKUN	URAIAN	AKRUAL PER TGL 31 DESEMBER 2019	JURNAL BALIK PER JANUARI 2020	REALISASI ANGGARAN 2020	TGL SP2D	NO SP2D	SELISIH jurnal balik dan akrual	KETERANGAN 1	SELISIH	KET 2
1	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	522111	Beban Langganan Listrik	3.169.988	3.169.988	3.169.988	02/02/2020	180161301000836	-		-	
2	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	522112	Beban Langganan Telepon	298.368	298.368	335.738	02/02/2020	180161301000836	-		(37.370)	
3	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	522113	Beban Langganan Air	1.602.708	1.602.708	3.712.944	02/02/2020	180161301000836	-		(2.110.236)	
4	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	521111	Beban Keperluan Perkantoran	893.500	893.500	893.500	02/02/2020	180161301000827	-		-	
5	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	511111	Beban Gaji Pokok PNS	881.400	881.400	5.643.500	12/03/2020	180161301003660	-		(4.762.100)	
6	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	291	291	334	12/03/2020	180161301003660	-		(43)	
7	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	511121	Beban Tunj. Suami / Istri PNS	88.140	88.140	564.350	12/03/2020	180161301003660	-		(476.210)	
8	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	511122	Beban Tunj. Anak PNS	24.468	24.468	81.580	12/03/2020	180161301003660	-		(57.112)	
9	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	12/03/2020	180161301003660	-		-	
10	00501	2600	308035	PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4.035.904	4.035.904	1.020.236	12/03/2020	180161301003660	-		3.015.668	
														(4.427.403)	
11	00501	2600	672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	522111	Beban Langganan Listrik	1.792.712	1.792.712	1.792.712	06/02/2020	181211301000446	-		-	
12	00501	2600	672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	522112	Beban Langganan Telepon	39.735	39.735	39.735	06/02/2020	181211301000446	-		-	
13	00501	2600	672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	521111	Beban Keperluan Perkantoran	891.550	891.550	891.550	06/02/2020	181211301000445	-		-	
14	00501	2600	672994	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	511129	Beban Uang Makan PNS	444.000	444.000	407.000	16/03/2020	181211301001926	-		37.000	
														37.000	
15	00501	2600	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	522111	Beban Langganan Listrik	2.444.185	2.444.185	2.551.000	07/02/2020	181461301000530	-		(106.815)	
16	00501	2600	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	522112	Beban Langganan Telepon	160.484	160.484	208.000	07/02/2020	181461301000530	-		(47.516)	
17	00501	2600	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	521111	Beban Keperluan Perkantoran	6.838.000	6.838.000	6.838.000	07/02/2020	181461301000530	-		-	
18	00501	2600	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	511111	Beban Gaji Pokok	687.600	687.600	687.600	07/02/2020	181461301000088	-		-	
19	00501	2600	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	123	123	123	07/02/2020	181461301000088	-		-	
20	00501	2600	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68.760	68.760	68.760	07/02/2020	181461301000088	-		-	
21	00501	2600	673041	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	511122	Beban Tunj. Anak PNS	27.504	27.504	27.504	07/02/2020	181461301000088	-		-	
														(154.331)	
22	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	522111	Beban Langganan Listrik	4.972.308	4.972.308	4.972.308	26/01/2020	180161301000382	-		-	
23	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	522112	Beban Langganan Telepon	38.745	38.745	38.745	26/01/2020	180161301000382	-		-	
24	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	522113	Beban Langganan Air	57.500	57.500	57.500	26/01/2020	180161301000382	-		-	
25	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1.518.550	1.518.550	1.518.550	26/01/2020	180161301000382	-		-	
26	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	511111	Beban Gaji Pokok	-	-	1.110.300	17/01/2020	180161301000172	-		(1.110.300)	
27	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	511119	Beban Pembulatan Gaji	-	-	183	17/01/2020	180161301000172	-		(183)	
28	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	511122	Beban Tunj. Anak PNS	-	-	23.928	17/01/2020	180161301000172	-		(23.928)	
29	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	511125	Beban Tunj. ppH PNS	-	-	179.858	17/01/2020	180161301000172	-		(179.858)	
30	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	511111	Beban Gaji Pokok	-	-	709.800	15/03/2020	180161301003835	-		(709.800)	
31	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	70.980	15/03/2020	180161301003835	-		(70.980)	
32	00501	2600	578885	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU	511122	Beban Tunj. Anak PNS	-	-	28.392	15/03/2020	180161301003835	-		(28.392)	
														(2.123.441)	
						Total								(6.668.175)	



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA IC110

Nomor : **54** /BUA.4/PL.07/12/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Pencatatan Aset Dari Bank BTN

23 Desember 2020

- Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.

di Tempat

Perjanjian Kerjasama Satuan Kerja dengan Bank BTN telah berlangsung pada periode berkala, sampai pada pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) di tahun 2019 menjadi temuan yang cukup signifikan, perjanjian kerjasama tersebut menghasilkan aset-aset yang digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari satuan kerja baik untuk pelayanan kepada masyarakat ataupun untuk operasional sehari-hari.

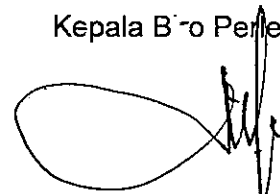
Sesuai rekomendasi BPK RI, aset-aset yang diperoleh dari kerjasama tersebut baik di tahun berjalan 2020 maupun yang diperoleh pada tahun sebelumnya untuk dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAKBMN dalam rangka pengamanan aset yang telah diterima dan telah digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020, maka perlu diberikan petunjuk terkait pencatatan aset-aset tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Aset yang diperoleh dibawah tahun 2020, yang dicatatkan pada tahun 2020 menggunakan menu **Saldo Awal** pada aplikasi SIMAKBMN;
2. Aset yang diperoleh pada tahun berjalan 2020 sebelum berlakunya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain, pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penatausahaan BMN, yaitu:
 - a. Jika satuan kerja bisa mendapatkan Naskah Perjanjian Hibah dan BAST yang tidak mensyaratkan apapun di dalamnya dari Bank BTN, maka digunakan transaksi **Hibah Masuk**, yang kemudian dilakukan registrasi ke Kanwil DJPB setempat;
 - b. Jika satuan kerja tidak bisa mendapatkan Naskah Perjanjian Hibah dan BAST yang tidak mensyaratkan apapun di dalamnya dari Bank BTN, maka untuk pencatatan aset menggunakan menu **Perolehan Lainnya** pada aplikasi SIMAKBMN dengan dasar surat keterangan dari KPB;

3. Setelah berlakunya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 552/SEK/SK/VIII/2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain, maka satuan kerja hanya diperkenankan untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut tanpa adanya akibat-akibat yang didapatkan oleh satuan kerja khususnya dalam menerima aset.
4. Jika satuan kerja menerima aset dari pihak ketiga/pihak lain manapun harus dilakukan tanpa adanya perjanjian yang mensyaratkan apapun dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian apapun yang akan atau sudah dilakukan. Sehingga setiap aset yang diperoleh dari pihak ketiga/pihak lain manapun harus memenuhi kriteria Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perengkapan



ROSFIANA, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : ~~99~~ /BUA.4/PL.C71/2/2020

23 Desember 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pelaksanaan Pencatatan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN
Periode Revaluasi Tahun 2020 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2020

- Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.

di Tempat

Sesuai dengan *riis update* aplikasi dan *referensi* SIMAK BMN Versi 20.1.0 untuk perbaikan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian kembali (IP) BMN dengan periode pelaksanaan Revaluasi BMN tahun 2020 dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Mahkamah Agung RI tahun 2020, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat ini dengan berpedoman pada:

1. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-26/PB/PB.6/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal Rilis Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.1.0 Dalam Rangka Pencatatan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 serta Penyusunan LKKL Tahun 2020.
2. Petunjuk Teknis Instalasi Update Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.1.0
3. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-15/KN/2020, tanggal 23 Januari 2020, perihal Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Koreksi Hasil Revaluasi BMN

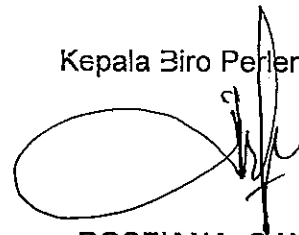
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan bagi satuan kerja yang belum selesai melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN untuk segera melaksanakan tindak lanjut penyelesaian sesuai petunjuk dan arahan yang telah disampaikan sebagai berikut:

1. Satuan kerja yang belum selesai dalam tahapan penilaian BMN sampai dengan BAR IP Selesai (**tahap akhir, status 9**) sesuai hasil monitoring revaluasi BMN pada aplikasi SIMAN untuk dapat segera melaksanakan tindak lanjut penyelesaian dengan berkoordinasi pada KPKNL setempat serta mengirimkan data tindak lanjut dengan *update* data pada aplikasi SIMAN.
2. Satuan kerja untuk melakukan verifikasi dan validasi data pelaksanaan revaluasi BMN yang meliputi data dan informasi terkait : **jumlah objek barang, luas (hasil pengukuran), kondisi barang, status** dan **pelaksanaan pengelolaan BMN** sebagaimana termuat dalam Formulir Pendataan Objek Penilaian Kembali, Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) dengan laporan BMN. Apabila terdapat ketidaksesuaian untuk dapat segera berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk tindak lanjut perbaikan data revaluasi BMN.

3. Satuan kerja untuk melaksanakan tindak lanjut atas Barang Tidak Ditemukan dari hasil revaluasi BMN tahun 2020 dengan membentuk Tim Internal untuk melakukan verifikasi BMN yang tidak ditemukan, untuk menentukan tindak lanjut penyelesaian, apabila terdapat indikasi kerugian negara maka dilakukan proses TGR sesuai ketentuan yang berlaku, namun apabila kesalahan administrasi/ pencatatan dalam laporan BMN maka dilakukan proses penghapusan sesuai BA-04 dan BA-05 dari Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) BMN. Tindak lanjut penyelesaian Barang Tidak Ditemukan dibuat dalam Surat Keterangan dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang, sebagai dasar koreksi pencatatan dalam aplikasi SIMAK BMN melalui menu penghapusan (301) pada periode laporan BMN semester II tahun 2020.
4. Perekaman koreksi hasil revaluasi dilakukan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN (*file csv*) dalam menu *Upload* Koreksi Penilaian Kembali pada Aplikasi SIMAK BMN versi 20.1.0 untuk selanjutnya koreksi pencatatan tersebut dilakukan pengiriman data hasil koreksi revaluasi dalam menu **Pemutakhiran Data** untuk dilakukan **Sinkronisasi Data SIMAK** → **SIMAN** pada periode laporan BMN semester II tahun 2020.
5. Satuan kerja untuk melihat hasil penginputan koreksi penilaian dalam laporan SIMAK BMN dengan nilai dalam Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) terkait hasil perekaman revaluasi BMN yang meliputi : Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, Nilai Buku dan Nilai Wajar. Apabila terdapat ketidaksesuaian untuk dapat segera berkoordinasi dengan KPKNL setempat serta pembina laporan BMN pada Biro Perlengkapan.
6. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas data dan nilai dari pelaksanaan revaluasi BMN serta hasil perbaikan pencatatan nilai barang dalam laporan SIMAK BMN.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Biro Perlengkapan



ROSFIANA, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
5. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;